

ABSTRAK

Nur Badiah “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2019/PN SMG)”

Berbagai modus penipuan melalui media online pun secara terus menerus sering terjadi dan kebanyakan pelaku kejahatan pun semakin banyak cara untuk melakukan aksinya. Salah satunya yaitu dengan cara membuat situs-situs web yang palsu dengan adanya situs ini disilah barang-barang tersebut diedarkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan bentuknya yang beraneka ragam dengan harga yang relatif mudah terjangkau dengan maksud dan tujuan agar para pembeli tertarik dengan harga yang ditawarkan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis dan menggambarkan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia diatur pada pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah di mata hukum. Perbuatan Loekito Hidajat mengunggah tulisan dan atau gambar yang bermuatan penghinaan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seorang notaris tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 310 ayat (2) dengan tujuan agar tulisan dan atau gambar dapat dibaca atau dilihat atau dipertunjukkan kepada orang banyak atau masyarakat umum. Namun demikian karena menyiarkan atau menyebarkan tuduhan atas perbuatan membuat akta palsu. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online ditunjukkan dengan dibentuknya UU ITE Pasal 28 ayat 1 Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa pihak penegak hukum dapat menjatuhkan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.

Kata Kunci : UU ITE, tindak pidana, penipuan online.

ABSTRACT

Nur Badiah “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2019/PN SMG)”

Various modes of fraud through online media are constantly happening and most criminals are getting more and more ways to carry out their actions. One of them is by creating fake web sites with this site, where these items are circulated at prices that vary according to their various forms at relatively easy- to-affordable prices with the aim and purpose of making buyers interested in the prices offered. . The purpose of this study is to analyze and describe the legal arrangements for online fraud in the perspective of criminal law in Indonesia and to analyze and describe efforts to prevent online fraud. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method based on Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Researchers use normative legal research in this study. The data collection technique that the author uses is library research data collection techniques and field studies, while the types of data used in the research are secondary data and primary data. The legal regulation of online fraud in the perspective of criminal law in Indonesia is regulated in Article 378 of the Criminal Code so that all types of electronic transactions that harm one party can be used as legal evidence in the eyes of the law. Loekito Hidajat's act of uploading writings and or pictures containing insults to attack the honor and good name of a certain notary as referred to in Article 310

paragraph (2) with the aim that the writing and or pictures can be read or seen or shown to many people or the general public. However, for broadcasting or spreading accusations of making false deed. Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of online fraud are shown by the establishment of the ITE Law Article 28 paragraph 1 Article 378 of the Criminal Code which states that law enforcers can impose layered articles on perpetrators of fraudulent crimes who have met the requirements of the two articles.

Keywords: *ITE Law, criminal acts, online fraud.*